

# RENCANA KERJA 2025

RENCANA KERJA  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2025





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadapan Tuhan Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025. Rencana Kerja merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah yang disusun berdasarkan atas Rancangan Renja..

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan ini. Semoga Tuhan selalu menerangi segala upaya kita dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

JAYAPURA, 24 FEBRUARI 2025  
**Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI PAPUA**  
  
**DR. dr. ARRY PONGTIKU, MHM**  
**PEMBINA Tk. I / IV.b**  
**NIP. 19680111 199803 1 006**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II     HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN	
TAHUN 2024 .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra	
Dinas Kesehatan .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .....	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	
Kesehatan .....	28
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD .....	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .....	48
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN .....	49
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan .....	50
3.3 Program dan Kegiatan .....	50
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN	
.....	57
BAB V     PENUTUP .....	80

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi APBD Program Dinas Kesehatan Tahun 2024 .....	8
Tabel 2.2	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan .....	9
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .....	23
Tabel 2.4	Jumlah Kematian Ibu Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024 .....	25
Tabel 2.5	Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Dinas Kesehatan .....	30
Tabel 3.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan .....	52
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025 .....	58



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2024–2026.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sesuai tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 memuat rancangan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Renja

Dinas Kesehatan Tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun 2025. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah antara lain:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024- 2026;
2. Merumuskan program-program prioritas dalam rangka pencapaian target kinerja;
3. Merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025;
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan;
5. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dan keselarasan program, kegiatan Dinas Kesehatan dengan program dan kegiatan pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPD;
6. Menjadi acuan untuk menyusun evaluasi kinerja tahunan Dinas Kesehatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025, proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan, keterkaitan antara Renja Dinas Kesehatan dengan Dokumen RPD dan Renstra Dinas Kesehatan serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD. Disampaikan juga tentang landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kesehatan serta maksud dan tujuan disusunnya Renja Dinas Kesehatan.

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2022**

Pada Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Evaluasi ini juga dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun- tahun sebelumnya. Bab ini juga menyajikan analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan yang berisikan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Disamping itu bab ini juga berisikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA**

Pada bab ini menyajikan tentang telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, tujuan dan sasaran Renja yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua serta dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan. Bab ini juga menyajikan uraian program dan kegiatan serta rekapitulasinya.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN**

Pada bab ini disajikan tentang rencana kerja berupa rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan perkiraan maju rencana tahun 2026.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab penutup diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023**

Evaluasi merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian target kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 sebanyak 5 program, 16 kegiatan dan 34 sub kegiatan;
2. Anggaran APBDP Dinas Kesehatan Tahun 2024 dari sebesar Rp.266.991.894.815,- dengan realisasi sebesar Rp.247.310.198.979,00 ,- dengan persentase 92,63 %;
3. Realisasi APBD Program yang dilaksanakan Dinas Kesehatan tahun 2024 sebanyak 5 program, dengan rincian pagu dan realisasinya tercantum melalui tabel 2.1 dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi APBD Program Dinas Kesehatan Tahun 2024**

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 220.586.252.966.00	Rp.201.999.992.287.00	91,57 %
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 37.936.744.329.00	Rp. 36.859.272.451.00	97,16 %
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 7.010.590.900.00	Rp. 6.999.499.211.00	99,84%
4	Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp.298.331.620.00	Rp.296.310.510.00	99,32%
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.159.975.000.00	Rp. 1.155.124.520.00	99,87%
<b>TOTAL</b>		Rp. 266.991.894.815.00	Rp. 247.310.198.979.00	92,63%

Secara lengkap terkait hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						DINAS KESEHATAN									
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB									
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG									
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-					-		
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-					-		
	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2054 Orang/Bulan	12	716 Orang/Bulan	716	1	2054	2782	695,5
	1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-					-		
	1	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0		0		15	15	3,75
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-					-		
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		2		0		37	39	9,75



	1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-					-			
	1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK										
						Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Perizinan	38 Sasaran	5	5 Sarana	5	1	6	16	4		
	1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-				-				
	1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional										
						Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		3	3 Sarana	3	1	6	12	3		
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-				-				
	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-				-				
	1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi										
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	9 Dokumen	3	3 Dokumen	3	1	5	11	2,75		

	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-					-			
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		50	50 Orang	50	1	50	150	37,5		
	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0		0		30	30	7,5		
	1	02	03	3.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-				-				
	1	02	03	3.02	0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	10 Dokumen	3	3 Dokumen	3	1	10	16	4		
	1	02	03	3.03		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	-	-				-				
	1	02	03	3.03	0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN										
						Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	100 Orang	50	50 Orang	50	1	100	200	50		
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-				-				

1	02	02	3.02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia								
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		3	3 Dokumen	3	1	5	11	2,75
1	02	02	3.02	0046	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan								
					jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun		0	0		1	1		0,25
1	02	02	3.02	0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi								
					Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar		3	0		9	12	3	
1	02	02	3.02	0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular								
					Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar		3	0		9	12	3	
3	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-			
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-			-			
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	200 Orang	60	50 Orang	50	1	50	160	40
1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi		0	0		20	20	5	



1	02	02	3.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-						-		
1	02	02	3.02	0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya										
						Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya		5	5 Dokumen	5	1	9	19		4,75
1	02	02	3.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		5	5 Dokumen	5	1	9	19		4,75
1	02	02	3.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		3	3 Dokumen	3	1	9	15		3,75
1	02	02	3.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		3	3 Dokumen	3	1	9	15		3,75
1	02	02	3.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		3	3 Dokumen	3	1	9	15		3,75

1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	9 Dokumen	5	5 Dokumen	5	1	5	15	3,75
1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas									
						Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas		5	5 Dokumen	5	1	5	15	3,75
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-				-			
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10 Dokumen	3	3 Dokumen	3	1	10	16	4
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-				-			
1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
						Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		0		0		9	9	2,25
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit									
						Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		0		0		5	5	1,25
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan	5 Unit	5	5 Unit	5	1	5	15	3,75

1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	9	9 Dokumen	9	1	5	23	5,75
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		9	9 Dokumen	9	1	5	23	5,75
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	9 Dokumen	9	9 Dokumen	9	1	5	23	5,75
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 Dokumen	9	9 Dokumen	9	1	9	27	6,75
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	2 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	3	5	1,25
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9 Dokumen	5	5 Dokumen	5	1	7	17	4,25
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	9 Dokumen	9	9 Dokumen	9	1	5	23	5,75

1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana									
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	200 Orang	100	100 Orang	100	1	200	400	100	
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100	100 Orang	100	1	200	400	100	
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak									
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	9 Dokumen	9	9 Dokumen	9	1	9	27	6,75	
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif									
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		9	9 Dokumen	9	1	20	38	9,5	
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dokumen	9	9 Dokumen	9	1	9	27	6,75	
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	9	9 Dokumen	9	1	5	23	5,75	

1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan										
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		5	5 Unit	5	1	3	13	3,25	
1	02	02	1.01	0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		6	6 Unit	6	1	3	15	3,75	
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan										
						Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		9	9 Dokumen	9	1	5	23	5,75	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		9	9 Paket	9	1	9	27	6,75	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-				-				

	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12	12 Unit	12	1	6	30	7,5	
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-					-			
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-					-			
	1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		0	12 Unit	12	1	3	15	3,75	
	1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		0		0		1	1	0,25	
	1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan		6	2 Unit	2	1	1	9	2,25	
	1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi									
						Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara		3	3 Unit	3	1	2	8	2	

	1	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1	1 Unit	1	1	1	3	0,75
	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6	6 Paket	6	1	20	32	8
	1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12	12 Unit	12	1	20	44	11
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-		
	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		30	30 Laporan	30	1	20	80	20
	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		10	10 Laporan	10	1	25	45	11,25
	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3	3 Laporan	3	1	12	18	4,5
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-		
	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		30	30 Unit	30	1	25	85	21,25



1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0		10	10	2,5		
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-				
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	0	1 Paket	1	1	20	21	5,25	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	3 Paket	3	1	20	25	6,25	
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	0		50	53	13,25		
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	3	3 Paket	3	1	5	11	2,75	
1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	3 Paket	3	1	20	26	6,5	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30 Laporan	30	1	50	110	27,5	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-				

	1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-					-			
	1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
							Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 Dokumen	3	3 Dokumen	3	1	15	21	5,25	
	1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-	-				-				
	1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM										
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM		3	3 Dokumen	3	1	5	11	2,75	
6	1	02	07			PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	-	-				-				
	1	02	07	3.01		Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	-	-				-				
	1	02	07	3.01	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	9 Unit	3	0		9	12	3		
	X					NON URUSAN										
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX										
7	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-				-				
	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-				
	X	XX	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	0		7	7	1,75		

Dari program dan kegiatan prioritas yang diampu oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2024, hanya satu yang tidak memenuhi target kinerja/ keluaran yang telah direncanakan, yaitu Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukn tingkat daerah Provinsi ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.2.699.213.559.00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.738.413.283.00 dan sisa anggaran Rp.960.800.276.00 sehingga berpengaruh pada perentase realisasinya hanya 64.40%.

Hal ini disebabkan karena terlambatnya laporan terkait dana DAK salur tahap 1, maka diharapkan terkait dengan pelaporan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terulang lagi hal seperti ini.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan didasarkan pada capaian kinerja pelayanan sesuai Indikator Kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Indikator	Target Renstra (Tahun)					Realisasi capaian (Tahun)					Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		
	<b>Indikator Tujuan :</b>											
1	Angka Kematian Ibu	150.00	135.00	121.5	109.35		185	253				
2	Angka Kematian Bayi	4.00	4.00	4.00	3.00		14	12				
3	Angka Kesakitan Penyakit Menular	50 %	50 %				23,6 %	100 %				
4	Proporsi Balita Gizi buruk/kurang	23 %	23 %				91,8 %	12,5 %				
	<b>Indikator Sasaran :</b>											
1	Cakupan Distrik memiliki minimal 1 Puskesmas yang bersertifikasi akreditasi	71,2 %	71,2 %				52 %	88 %				
2	Cakupan Rumah Sakit yang Bersertifikasi	100 %	100 %				78 %	100 %				
3	Cakupan Orang Asli Papua tidak mampu yang terlayani menggunakan jaminan kesehatan Papua	64 %	64 %				-	100 %				
4	Cakupan Kujungan Ibu Hamil K4	70 %	70 %				60,7 %	53.0 %				
5	Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan	45 %	45 %				82,6 %	62.1 %				
6	Cakupan Neonatus	45 %	45 %				80,5 %	66.0 %				
7	Cakupan Pelayanan Anak Balita	40 %	40 %				64,9 %	59.8 %				
8	Prevalensi Balita sangat kurus dan kurus (stunting)	23 %	23 %				91,8 %	12.5 %				
9	Cakupan Masyarakat Akses terhadap air bersih	60 %	60 %				32 %	86.0 %				
10	Cakupan Keluarga akses terhadap sanitasi (Stunting)	70 %	70 %				47 %	49,36 %				
11	Cakupan PHBS	45 %	45 %				-	78.40 %				

Cakupan Posyandu Aktif	87,0 %	87,0 %				88 %	79.83 %				
Cakupan Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria	69 %	69 %				0	-				
Cakupan ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV rutin	32,2 %	32,2 %				55 %	20.2 %				
Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate/CDR) yang diobati	95 %	95 %				84 %	82.5 %				
Jumlah Kumulatif Kab/Kota dengan 50% Desa/Kelurahan yang melaksanakan Posbindu	6 Kab	6 Kab				2 Kab	2 Kab				
Cakupan Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa dan NAPZA	22,8 %	22,8 %				49 %	42.6 %				
Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL)	95%	95%				67,4 %	62.9 %				
Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	100%	100%				9,3 %	100 %				
Jumlah Kumulatif Kab/Kota dengan angka prevalensi Kusta < 1 per 10.000 penduduk	9 Kab/ Kota	9 Kab/ Kota				11 Kab	24 % (23 Per 10.000 pddk)				
Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi filaria	9 Kab/ Kota	9 Kab/ Kota				6 Kab	3 Kab				
Cakupan puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan minimal 5 jenis tenaga (Perawat, Bidan, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan)	90 %	90 %				71 %	85 %				
Cakupan Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat & vaksin	92 %	92 %				94,08 %	97.5 %				
Pelaksanaan Diklat sesuai standart	100 %	100 %				100 %	100 %				
Cakupan puskesmas sesuai standar di daerah perbatasan	100 %	100 %				-	-				
Cakupan daerah terisolir/terpencil yang dilayani SATGAS KIJANG	-	-				0	-				
Cakupan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak dan gizi	50 %	50 %				0	52 %				
Cakupan Penyakit Menular endemik (Kusta, Filaria/Kaki Gajah, frambusia dan kecacingan)	50%	50%				-	100 %				
Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	100 %	100 %				100 %	100 %				
Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	88 %	88 %				86 %	86 %				

a. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu masyarakat, yang kejadiannya sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun faktor-faktor non kesehatan. Berdasarkan tabel diatas Angka Kematian Ibu di tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 253 per 100.000 KH dibanding tahun 2023 sebesar 185 per 100.000 KH.

Penurunan kematian terjadi di kabupaten Jayapura, Jumlah kematian ibu per kabupaten/kota kami sajikan dalam tabel 2.4 di bawah ini.

**Tabel 2.4**

**Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN	
		2023	2024
1	JAYAPURA	9	7
2	KEPULAUAN YAPEN	5	8
3	BIAK NUMFOR	2	4
4	SARMI	2	2
5	KEEROM	2	5
6	WAROPEN	-	1
7	SUPIORI	-	-
8	MAMBERAMO RAYA	1	1
9	KOTA JAYAPURA	6	10
	Prov.	27	38

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu pada tahun 2024, sebagai berikut:

- 1). Fasilitas kesehatan belum semuanya memenuhi standar,

- 2). Distribusi Tenaga Kesehatan dan pembagian tugas sesuai dengan kompetensi belum merata dan maksimal untuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
- 3). Kesiapan fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan sesuai standar belum optimal. Hal ini disebabkan karena kepatuhan terhadap standar dan tatalaksana kegawatdaruratan dan stabilisasai pra rujukan belum optimal. Keterbatasan tenaga, sarana juga menjadi perhatian seperti pendukung laboratorium;
- 4). Belum optimalnya kegiatan pendampingan baik kepada rumah sakit maupun FKTP.

b. Angka Kematian Bayi

Berdasarkan tabel diatas Angka Kematian Bayi di tahun 2024 mengalami kenaikan mencapai 12 per 1000 kelahiran hidup, dari target yaitu 4 per 1000. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023 yaitu 20 per 1000 kelahiran. Salah satu penyebab penurunan angka kematian bayi adalah semakin baiknya pencatatan dan pelaporan kematian.

Dalam upaya menurunkan Angka Kematian Bayi pada tahun 2024, Dinas Kesehatan menghadapi beberapa masalah, yaitu :

1. Fasilitas kesehatan rujukan dalam tatalaksana kegawatdaruratan bayi baru lahir belum memadai antara lain sarana pra sarana, alat pendukung, seperti alat bantu pernafasan dan obat-obatan serta ruangan sesuai standard;
2. Sumber daya manusia juga masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kompetensi dalam tatalaksana kegawatdaruratan bayi baru lahir;
3. Kesiapan tim PONED dan PONEK belum maksimal (manajemen dan teknis);
4. Tingkat partisipasi dalam kunjungan ke posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan masih rendah;
5. Kehadiran atau keaktifan ibu Balita dalam kelas ibu untuk meningkatkan pengetahuan ibu atau pengasuh dalam perawatan



balitanya belum maksimal;

c. Angka Kesakitan Penyakit Menular

Indikator angka kesakitan penyakit menular yang salah satunya Malaria. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan program Malaria Kabupaten/Kota tahun 2024, Belum ada dari 9 Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi Malaria di Provinsi Papua tahun 2024.

Permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian malaria antara lain:

1. Intervensi yang belum efektif dalam penguatan manajemen vektor terpadu;
2. Ketersediaan fasilitas serta kualitas diagnosis dan pengobatan dengue di seluruh fasilitas layanan kesehatan kurang diperkuat untuk mencegah fatalitas dengue;
3. Sistem surveilans kasus belum menunjukkan beban infeksi dengue dan penanggulangan KLB belum terkelola dengan baik;
4. Kebersinambungan partisipasi aktif masyarakat untuk penanggulangan dengue perlu diperkuat;
5. Kebijakan, komitmen, dan kemitraan belum optimal untuk mendukung program penanggulangan dengue;
6. Penguatan pengembangan dan pemanfaatan riset dan sistem informasi.

d. Proporsi Balita Gizi buruk/kurang

Berdasarkan standar WHO, suatu wilayah disebut mengalami masalah gizi masyarakat jika proporsi balita gizi kurang > 5%. Masalah ini dianggap serius bila proporsi balita gizi kurang sebesar 10,1% - 15,0%, dan dianggap kritis bila proporsi balita gizi kurang di atas 15,0%. Proporsi balita gizi buruk/kurang pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 12,5%. Kondisi ini dibawah capaian nasional sebesar 21,5 % (tahun 2023). Demikian juga bila dibandingkan dengan target daerah 23 % dan target pusat sebesar 14 %. Hal ini menunjukkan bahwa persentase gizi kurang di Provinsi Papua lebih rendah dari capaian nasional.

Keberhasilan Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam

menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Papua dipengaruhi oleh banyak faktor sebagai berikut:

1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang untuk menambah nilai gizi;
2. Pemenuhan alat-alat antropometri kit Posyandu oleh Kemenkes untuk meningkatkan deteksi tumbuh kembang bayi dan balita;
3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan gizi;
4. Pelaksanaan pertemuan koordinasi/konvergensi LP LS, kegiatan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi kegiatan gizi.

Dalam upaya penurunan masalah gizi pada balita di masyarakat tahun 2024 Dinas kesehatan Provinsi Papua menghadapi beberapa kendala yaitu:

1. Belum semua kabupaten memiliki TFC/Pusat perawatan/pemulihan gizi buruk;
2. Pelaksanaan entri e-PPG-BM belum maksimal;
3. Kegiatan surveilans gizi yang telah dilaksanakan selama ini masih belum optimal untuk menganalisis faktor determinan yang belum dikumpulkan secara rutin setiap bulan.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua**

Dengan memperhatikan capaian dan analisis hasil evaluasi Renstra serta mempertimbangkan isu strategis pada ranwal RKPD Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi di pelayanan rujukan;
- b. Belum semua kab/kota berhasil menurunkan kasus stunting secara signifikan/terjadi disparitas antar kab/kota,
- c. Masih tingginya kasus penyakit menular, termasuk meningkatnya kasus Malaria di Tahun 2024;
- d. Kasus penyakit tidak menular cenderung semakin meningkat, kesadaran masyarakat untuk deteksi dini masih kurang. Sistem

pencatatan dan pelaporan masih lemah;

- e. Distribusi tenaga kesehatan belum sesuai standar produksi, pemasaran, pemanfaatan hasil industri kesehatan obat bahan alam (obat tradisional) masih rendah. Pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi belum berkembang optimal.

Dalam pelaksanaan kinerja program/kegiatan tahun 2024, Dinas Kesehatan banyak melakukan koordinasi bersama kabupaten/kota karena sebagian besar program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan merupakan bentuk pembinaan dan pendampingan serta fasilitasi kepada kabupaten/kota sehingga diharapkan ketercapaian kinerja kabupaten/kota mendukung ketercapaian target pembangunan provinsi.

#### **2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pada tahap awal proses penyusunan rencana kerja, Dinas Kesehatan melakukan review terhadap rancangan akhir RKPD 2025 karena harus memastikan bahwa RKPD memfasilitasi kebutuhan Dinas Kesehatan di tahun 2025. Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Dinas Kesehatan, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2025 disandingkan dengan rancangan akhir RKPD Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Dinas Kesehatan Provinsi Papua**

Rancangan Akhir RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan										
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2				3	4	5	6	7	1	2				3	4	5	6	7	
	1				DINAS KESEHATAN			152.895.777.200,00						DINAS KESEHATAN			152.895.777.200,00			
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			152.845.777.200,00		1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			152.845.777.200,00			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			152.845.777.200,00			1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			152.845.777.200,00			
1		1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	126.415.777.200,00		1		1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	126.415.777.200,00		
		1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	116.395.422.200,00			1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	116.395.422.200,00	
		1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2054 Orang/ Bulan	116.395.422.200,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2054 Orang/ Bulan	116.395.422.200,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
		1	02	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	400.000.000,00			1	02	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	400.000.000,00	
		1	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					1	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	400.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	400.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
		1	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.500.000.000,00			1	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.500.000.000,00	

						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	5 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	5 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-	400.000.000,00			1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-	400.000.000,00	
	1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				
						Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	15 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	15 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-	-	500.000.000,00			1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-	-	500.000.000,00	
	1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM						1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
6	1	02	07			PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	-	-	700.000.000,00		6	1	02	07			PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	-	-	700.000.000,00	

	1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK							1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK								
						Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	6 Sarana	500.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa								Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	6 Sarana	500.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-	500.000.000,00				1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-	500.000.000,00					
	1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional							1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional								
						Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	6 Sarana	500.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa								Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	6 Sarana	500.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	1.300.000.000,00			5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	1.300.000.000,00					
	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-	400.000.000,00				1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-	400.000.000,00					
	1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi							1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi								

	1	02	03	3.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	500.000.000,00			1	02	03	3.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	500.000.000,00		
	1	02	03	3.02	0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik						1	02	03	3.02	0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik					
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	10 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	10 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	1	02	03	3.03		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	-	-	1.000.000.000,00			1	02	03	3.03		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	-	-	1.000.000.000,00		
	1	02	03	3.03	0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN						1	02	03	3.03	0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN					
						Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi PapuaMeningkat	100 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi PapuaMeningkat	100 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	1.000.000.000,00		4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	1.000.000.000,00		
	1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-	500.000.000,00			1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-	500.000.000,00		



[illegible]

[illegible]

						Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	9 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	9 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	3.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS					1	02	02	3.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	3.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB					1	02	02	3.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	3.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria					1	02	02	3.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	3.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta					1	02	02	3.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.000.000.000,00			1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.000.000.000,00
	1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
						Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	9 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	9 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit						1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit			
						Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	5 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	5 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	3.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	5.530.000.000,00			1	02	02	3.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	5.530.000.000,00
	1	02	02	3.02	0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya						1	02	02	3.02	0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya			

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota					1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan					1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas					1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas			
						Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	500.000.000,00			1	02	02	1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	500.000.000,00
	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			



						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji					1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			

[illegible]



						Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	9 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	9 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	7.000.000.000,00			1	02	02	1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	7.000.000.000,00
	1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	200 Orang	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	200 Orang	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa





[illegible]





[illegible]

	1	02	07	3.01		Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	-	-	700.000.000,00			1	02	07	3.01		Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	-	-	700.000.000,00		
	1	02	07	3.01	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1	02	07	3.01	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	9 Unit	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	9 Unit	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	X					NON URUSAN			50.000.000,00			X					NON URUSAN			50.000.000,00		
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			50.000.000,00			X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			50.000.000,00		
7	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	50.000.000,00			7	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	50.000.000,00		
	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00			X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00		
	X	XX	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						X	XX	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Jumlah									152.895.777.200,00			Jumlah									152.895.777.200,00	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Program / kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.



**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Tahun 2025 adalah awal dari RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMN 2025- 2029 adalah sangat strategis yang menjadi bagian dari awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Indonesia Emas, sehingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025- 2029 kesehatan berada pada misi 1 Transformasi Sosial akan mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahterah, unggul dan berdaya saing.

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting untuk penanggulangan kemiskinan. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya kesehatan masyarakat dengan indikator meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan ini dapat dicapai melalui lima strategi pembangunan kesehatan 2005-2025 yaitu:

1. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan;
2. Pemberdayaan masyarakat dan daerah;
3. Pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan;
4. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
5. Penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua**

Dinas Kesehatan telah merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di tahun 2025 sebagai tahun kedua pencapaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2024-2026. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang tertuang di dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2024-2026 adalah Terwujudnya sumber daya manusia Papua yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing serta tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran :

1. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Rumusan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2025 mengacu kepada tujuan dan sasaran strategis bidang kesehatan beserta program prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026. Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, telah ditetapkan beberapa arahan program dan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2025. Program dan kegiatan prioritas ini difokuskan untuk pencapaian target kinerja : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Indikator Kinerja Daerah Bidang Kesehatan dan Program unggulan/prioritas bidang Kesehatan 2024-2026

Program yang diusulkan dalam Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2025 mencakup 1 program pendukung dan 4 program utama, sebagaimana terdapat pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Program pendukung dan program utama pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Tahun 2025 sebagai berikut :

- Program Pendukung : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program Utama : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Program Pemberdayaan

Masyarakat Bidang Kesehatan;

Jumlah rekapitulasi program pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua sebanyak 5 program dengan 16 kegiatan dan 34 sub kegiatan, UPTD Balai Pelatihan Kesehatan sebanyak 1 program, 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, UPTD Laboratorium Kesehatan sebanyak 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, UPTD SMK Kesehatan sebanyak 2 Program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang disajikan pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Di**  
**Lingkungan Dinas Kesehatan Prov Papua**

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				9	Penyediaan
				10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				12	Pengadaan Mebel
				13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
				5	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
				6	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				7	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
				8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
				10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

				12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
				13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
				18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
				20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				21	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
				22	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
				23	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
		3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	24	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	25	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				26	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
				27	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	28	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya

				29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS
				30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB
				31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria
				32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
				33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
				34	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
				35	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
				36	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				2	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
				4	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

		3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	5	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
		4	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	6	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
		2	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
		2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	2	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
		3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	3	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
5	PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	1	Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan, sub kegiatan, serta pagu indikatif, dirancang dan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Bidang, UPTD yang ada pada struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk mendukung pencapaian target sasaran Rancangan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Papua Tahun 2025.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2025**

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional					Daerah
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					DINAS KESEHATAN			152.895.777.200,00							179.785.000.000,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			152.845.777.200,00							179.725.000.000,00	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			152.845.777.200,00							179.725.000.000,00	
1	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	126.415.777.200,00					-		133.875.000.000,00	
	1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	116.395.422.200,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	120.000.000.000,00	
	1	02	01	1.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2054 Orang/Bulan	116.395.422.200,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	400.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.000.000.000,00	
	1	02	01	1.03	0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											

						Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	15 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	-	-	500.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.000.000.000,00	
	1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM										
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
6	1	02	07			PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	-	-	700.000.000,00					-	1.000.000.000,00	
	1	02	07	3.01		Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	-	-	700.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.000.000.000,00	
	1	02	07	3.01	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	9 Unit	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X					NON URUSAN			50.000.000,00						60.000.000,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			50.000.000,00						60.000.000,00	
7	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	50.000.000,00					-	60.000.000,00	
	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	60.000.000,00	
	X	XX	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

						Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	6 Sarana	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	1.300.000.000,00					-	2.400.000.000,00	
	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-	400.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.000.000.000,00	
	1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi										
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	5 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-	400.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	400.000.000,00	
	1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										

						Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi PapuaMeningkat	100 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA- KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	1.000.000.000,00					-			2.000.000.000,00	
	1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-	500.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-			1.000.000.000,00	
	1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK												
						Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Perizinan	6 Sarana	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA- KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-				1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-	500.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-			1.000.000.000,00	
	1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional												

						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	3.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	500.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.000.000.000,00	
	1	02	03	3.02	0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	10 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	3.03		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	-	1.000.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.500.000.000,00	
	1	02	03	3.03	0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN										

						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	20 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.100.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.800.000.000,00	
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	50 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan										

	1	02	02	3.02	0046	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan											
						jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	1 dokumen	30.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	3.02	0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi											
						Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	9 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	3.02	0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular											
						Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	3.700.000.000,00					-		6.100.000.000,00	
	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-	1.100.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-		1.800.000.000,00	
	1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan											



						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	3.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	3.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	3.02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	5 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	3.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	5.530.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.550.000.000,00	
	1	02	02	3.02	0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya										
						Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	9 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	3.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	3.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB										

	1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas											
						Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	500.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-		1.000.000.000,00	
	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.000.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-		3.500.000.000,00	
	1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	9 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit											
						Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan											

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota										
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan										
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	3 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	20 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya										

	1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana											
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	200 Orang	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)											
						Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak											
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	9 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif											



						Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	5 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	9 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	7.000.000.000,00			-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	12.400.000.000,00	

						Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	2 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan										
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	3 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.01	0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	3 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan										

						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	100.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	19.730.000.000,00					-	34.350.000.000,00	
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	4.700.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.900.000.000,00	
	1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3 Unit	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya										
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi										

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	20.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	25 Laporan	1.800.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.000.355.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	600.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	750.000.000,00	
	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.500.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.200.000.000,00	
	1	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel										
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Paket	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.820.355.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.925.000.000,00	
	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAA NNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material										
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	200.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	400.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.500.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.100.000.000,00	
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	1.000.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	500.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.200.000.000,00		-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.900.000.000,00	
	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	800.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										



						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	50.000.000,00	Kota Jayapura, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN - ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
<b>Jumlah</b>								<b>152.895.777.200,00</b>							<b>179.785.000.000,00</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan telah disusunnya Renja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2025 yang berpedoman dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2025, maka dapat dijadikan acuan bagi seluruh Unit Kerja/Bidang yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan 1 (satu) tahun ke depan. Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Dalam Renja Dinas Kesehatan 2025 memuat rencana kebijakan serta rencana program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Kesehatan yang merupakan penjabaran tahunan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di tahun 2025;
2. Renja Dinas Kesehatan 2025 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan, dan dibantu oleh Sekretaris dan para Kepala Bidang yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua;
3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Pemerintah Provinsi Papua, keberadaan Renja Dinas Kesehatan diintergrasikan dengan rancangan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kesehatan (RKA Dinkes).

Rencana Kerja Akhir ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk kegiatan tahun 2025. Semoga upaya Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2025 dalam melaksanakan urusan kesehatan di Provinsi Papua dapat lebih terarah dan terukur.